



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN KETUA BPK
PADA
PENYERAHAN IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2009 KEPADA DPR
SELASA, 15 SEPTEMBER 2009**

**Saudara Ketua,
Saudara-saudara Wakil Ketua,
Para Pimpinan Komisi dan Alat-alat Kelengkapan Dewan,
Para Anggota DPR,
Para Undangan,
Hadirin yang saya muliakan**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*
Selamat Pagi, dan Salam sejahtera untuk kita semua**

Pertama-tama, marilah kita bersama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna yang mulia ini dalam rangka penyerahan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2009.

Memenuhi amanat Undang Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hari ini BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2009. Penyerahan IHPS dan LHP kepada rakyat melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertujuan untuk memberikan informasi menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kurun waktu satu semester.

Jenis pemeriksaan BPK pada IHPS I Tahun 2009 ini meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Objek pemeriksaan BPK dalam Semester I Tahun 2009 sejumlah 491 entitas terdiri dari 382 objek pemeriksaan keuangan dengan cakupan pemeriksaan meliputi neraca (dengan rincian aset senilai Rp2.400 triliun, kewajiban senilai Rp1.700 triliun, serta ekuitas senilai Rp761 triliun) dan Laporan Realisasi Anggaran (dengan rincian: pendapatan senilai Rp1.212 triliun, dan belanja/biaya senilai Rp1.219 triliun).

PDTT meliputi 103 objek pemeriksaan dengan cakupan senilai Rp136,63 triliun, dan enam pemeriksaan kinerja dengan cakupan tidak secara spesifik menunjuk nilai tertentu. Total temuan dari 491 Laporan Hasil Pemeriksaan adalah Rp33,56 triliun. Dari total temuan tersebut di antaranya adalah temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan adanya kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan dan kekurangan penerimaan bagi negara/daerah/perusahaan senilai Rp28,49 triliun. Selama proses pemeriksaan berlangsung dari nilai temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp525,32 miliar.

Pimpinan Rapat serta hadirin yang saya muliakan

Untuk jenis pemeriksaan keuangan, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) Tahun 2008, 83 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) Tahun 2008, 293 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2008, satu LKPD Tahun 2007, serta lima laporan keuangan badan lainnya.

BPK memberikan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atas LKPP Tahun 2008. Walaupun selama lima tahun berturut-turut LKPP memperoleh opini TMP, sejak Tahun 2008 pemerintah telah melakukan upaya-upaya perbaikan yakni (i) penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN); (ii) penyempurnaan aplikasi administrasi penerimaan perpajakan; (iii) pengungkapan secara memadai belanja di luar mekanisme APBN yang berasal dari rekening antara penerimaan; (iv) penertiban rekening pemerintah; (v) penyajian sebagian besar penyertaan modal negara berdasarkan laporan keuangan yang telah diperiksa; (vi) penyelesaian inventarisasi dan revaluasi atas sebagian aset tetap; dan (vii) penyempurnaan administrasi pinjaman luar negeri khususnya penyajian saldo pinjaman luar negeri.

Selain memberikan opini terhadap LKPP, LHP terkait juga memaparkan beberapa temuan tentang kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) serta berbagai ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, temuan yang menonjol antara lain adalah terdapat 8.200 satuan kerja belum membukukan hasil revaluasi aset tetap

senilai Rp77 triliun dan terdapat aset tetap pada kementerian/lembaga senilai hampir Rp16 triliun yang belum dapat dijelaskan keberadaannya oleh satuan kerja terkait; serta terdapat aset lain-lain, meliputi, aset eks kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi (KKKS) senilai Rp303 triliun, aset PT PPA senilai Rp5 triliun, dan aset Tim Koordinasi Departemen Keuangan senilai Rp7 triliun (aset pemerintah eks BPPN), yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian kembali.

Berbagai kelemahan SPI serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga dilaporkan dalam LHP atas LKKL. Laporan yang menonjol antara lain kasus di Departemen Kesehatan yaitu adanya pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN berupa belum tertibnya pengelolaan kegiatan pemberian *grant*/bantuan/hibah senilai Rp691 miliar. Selanjutnya pada bagian Anggaran Pembiayaan Perhitungan (BAPP) 099, diperoleh temuan belum adanya standar operasi dan prosedur (SOP) formal, yaitu pemerintah belum menetapkan kebijakan akuntansi atas penerbitan *promissory notes* kepada lembaga internasional senilai Rp28 triliun dan belum mengakui utang kepada Bank Indonesia (BI) senilai hampir Rp3 triliun atas dana talangan dalam rangka keanggotaan kepada lembaga tersebut. Pada sembilan satuan kerja eselon I di lingkungan Departemen Dalam Negeri (Depdagri), ditemukan adanya kelebihan pembayaran perjalanan dinas senilai hampir Rp3 miliar. Atas temuan tersebut, pihak terkait di Depdagri telah menyetorkan uang ke kas negara senilai hampir Rp1,3 miliar pada 29 Mei 2009. Selain itu, pada sembilan satuan kerja eselon I di lingkungan Depdagri juga ditemukan kelebihan pembayaran atas belanja barang/jasa konsultan senilai Rp1,5 miliar. Atas temuan tersebut, Depdagri telah menyetorkan uang ke kas negara senilai Rp246 juta pada 29 Mei 2009. Di Departemen Luar Negeri (Deplu), diperoleh temuan terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang belum disetor ke kas negara senilai Rp768 miliar. Atas temuan tersebut, Deplu telah menyetorkan uang ke kas negara senilai Rp416 miliar.

Dalam semester I Tahun 2009, ditingkat pusat, BPK telah memberikan opini atas 83 LKKL dengan rincian sebagai berikut: sebanyak 35 LKKL memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP), 30 LKKL mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP), dan 18 LKKL memperoleh opini TMP. Sementara itu, dari 293 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2008 yang telah diperiksa BPK pada Semester I Tahun 2009, BPK memberikan opini WTP atas 8 LKPD, opini WDP atas 217 LKPD, opini tidak wajar (TW) atas 21 LKPD, dan opini TMP atas 47 LKPD. Permasalahan yang masih dijumpai terkait dengan temuan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan diantaranya sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang tidak memadai, perencanaan anggaran kegiatan yang tidak tepat, dan kelebihan pembayaran tunjangan.

Pimpinan Rapat serta hadirin yang saya muliakan

Pada Semester I Tahun 2009, pemeriksaan kinerja hanya dilaksanakan terhadap dua obyek pemeriksaan, yaitu pemeriksaan kinerja atas Pengendalian Pencemaran Air Sungai Ciliwung dan Pengelolaan Pengawasan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan bahwa pengendalian pencemaran air Sungai Ciliwung kurang efektif. Hal tersebut terlihat dalam proyek percontohan pembangunan instalasi pengolahan limbah (IPAL) komunal yang tidak berfungsi dengan baik dan kesepakatan bersama pengelolaan Sungai Ciliwung antar daerah Tahun 2004–2009 yang terhenti implementasinya pada Tahun 2007. Sementara itu, pemeriksaan pada BNP2TKI, BPK menemukan antara lain adanya ketidakefektifan dalam pengawasan TKI oleh BNP2TKI dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi karena keduanya belum memiliki pemahaman yang sama dan mekanisme koordinasi yang memadai dibidang pengawasan.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi 103 obyek pemeriksaan yang terdiri dari 46 obyek pemeriksaan pada pemerintah pusat, 36 obyek pemeriksaan pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota, 16 obyek pemeriksaan pada BUMN, dan 5 obyek pemeriksaan pada BUMD. Temuan signifikan dari PDTT antara lain di Kejaksaan Agung, terdapat uang pengganti senilai Rp5 triliun dan USD293 juta serta denda senilai Rp30 miliar di lingkungan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta belum berhasil ditagih. Di Departemen Kehutanan, terdapat kelebihan pembayaran biaya jasa pemeliharaan (Jasper) Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Tahun 2007 dan 2008 senilai hampir Rp17 miliar.

Pimpinan Rapat serta hadirin yang saya muliakan

Penyerahan IHPS saat ini mempunyai makna tersendiri bagi saya secara pribadi dan bagi para anggota BPK Tahun 2004-2009, karena pada bulan Oktober mendatang masa jabatan pimpinan BPK akan segera berakhir. Atas nama semua Anggota BPK Tahun 2004–2009, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang telah terbangun baik selama ini dengan anggota Dewan yang terhormat untuk dapat bersama-sama mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula kami akan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaan BPK selama lima tahun terakhir yang ditandai upaya BPK memberikan rekomendasi perbaikan kualitas pengelolaan keuangan negara dan upaya pemerintah meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pimpinan Rapat serta hadirin yang saya muliakan

Sebagaimana diketahui hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah terhadap pemerintah pusat dan daerah selama Tahun 2004-2008 masih menunjukkan banyak kelemahan dan baru menunjukkan tanda-tanda perbaikan dalam satu tahun terakhir. Sejak diterbitkannya paket tiga Undang-Undang Keuangan Negara Tahun 2003–2004, implementasi undang-undang tersebut berlangsung sangat lamban. Hampir tidak ada satu pun jadwal waktu masa transisi yang disebut dalam undang-undang tersebut dipenuhi. Lambannya upaya pembangunan sistem keuangan tersebut disebabkan belum adanya upaya terpadu dari pemerintah untuk mengimplementasikan paket tiga UU Keuangan Negara. Hingga saat ini, sistem perbendaharaan negara belum sepenuhnya terkonsolidasi dalam suatu *treasury single account* (TSA), sistem akuntansi umum belum selaras dengan sistem akuntansi instansi dan administrasi aset maupun hutang negara belum tertata dengan baik. Peranan anggaran nonbujeter masih tetap besar, berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah dalam bidang keuangan negara masih saling bertentangan satu dengan lainnya dan belum selaras dengan semangat paket tiga UU Keuangan Negara. Disamping itu, lambannya pembangunan sistem keuangan negara oleh pemerintah juga terlihat pada belum terwujudnya anggaran berbasis kinerja, belum terpadunya teknologi informasi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta belum berfungsi dengan baik sistem pengendalian internal.

Lambannya pembangunan sistem keuangan negara terjadi pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Diantara kedua tingkat pemerintahan tersebut, pembangunan sistem keuangan pemda lebih lambat kemajuannya dibanding pemerintah pusat. Hal ini menggambarkan kemampuan daerah yang sangat terbatas untuk membangun kelembagaannya agar dapat menggunakan wewenang dan dananya yang semakin besar dalam rangka otonomi daerah. Akibat kelambanan perbaikan sistem keuangan negara, selama Tahun 2006–2008 opini yang diberikan atas LKPP, sebagian LKKL, dan sebagian LKPD adalah *disclaimer*, bahkan 15 LKPD dari 293 LKPD Tahun 2008 yang telah diperiksa BPK pada Semester I Tahun 2009 masih memperoleh opini tidak wajar.

Pimpinan Rapat serta hadirin yang saya muliakan

Sebagai auditor eksternal, kewenangan BPK hanya terbatas pada pemberian opini pemeriksaan, saran maupun rekomendasi perbaikan. BPK tidak memiliki kewenangan membuat UU, aturan, maupun tindakan yang bersifat memaksa guna memperbaiki sistem keuangan negara. Berbagai jenis kewenangan yang disebut terakhir hanya dimiliki oleh Pemerintah dan

DPR. Dengan dilatarbelakangi rasa keprihatinan terhadap fenomena penyimpangan keuangan negara baik di pusat maupun di daerah yang semakin marak, sejak Mei 2008 sampai dengan April 2009, saya sebagai Ketua BPK telah melakukan rangkaian kegiatan Dialog Publik dalam rangka mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kegiatan itu dilakukan pada sejumlah instansi Pemerintah Pusat, seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota serta DPRD di Indonesia, serta pada berbagai kedutaan besar RI di luar negeri. Kegiatan yang bertujuan untuk mendorong pembangunan sistem pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan negara seperti ini adalah sebenarnya merupakan porsi pemerintah.

Selain itu, sesuai dengan misi dan kewenangan BPK untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, BPK juga telah mengambil enam bentuk inisiatif untuk mendorong percepatan pembangunan sistem pembukuan dan manajemen keuangan negara. Keenam bentuk inisiatif itu merupakan *beyond the call of duty* bagi BPK yang mempengaruhi baik eksekutif maupun legislatif, yakni; (1) Memperluas objek pemeriksaan, baik pada sisi pendapatan maupun pengeluaran negara. Selama masa pemerintahan orde baru, BPK hanya dapat memeriksa sebagian pengeluaran negara. (2) Mewajibkan semua terperiksa (*auditee*) menyerahkan *management representation letter* (MRL) kepada BPK. (3) Mewajibkan semua terperiksa untuk menyusun rencana aksi (*action plan*) guna meningkatkan opini pemeriksaan laporan keuangannya. (4) Membantu entitas pemerintah mencari jalan keluar untuk mengimplementasikan rencana aksi yang telah disusun dan diserahkan kepada BPK. Untuk mengatasi kelangkaan SDM, misalnya, BPK menyarankan agar instansi pemerintah Pusat dan Daerah meminta bantuan tenaga akuntan dari BPKP. Tujuan awal Pemerintah mendirikan BPKP adalah untuk membangun sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia dan mengawasi keuangan negara. Dalam masa pemerintahan Orde Baru, BPKP disalahgunakan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara menyaingi BPK. Alternatif lain untuk memenuhi keperluan SDM adalah dengan merekrut sendiri tenaga-tenaga akuntan ataupun mengirimkan pejabatnya pada berbagai perguruan tinggi yang memiliki jurusan akuntansi ataupun berbagai kursus kedinasan mengenai administrasi keuangan negara. (5) Mendorong perombakan struktural BLU, BUMN dan BUMD serta yayasan maupun kegiatan bisnis yang terkait dengan kedinasan agar menjadi lebih mandiri dan korporatis; (6) Menyarankan kepada DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kab/Kota untuk membentuk panitia akuntabilitas publik (PAP).

Melalui kesempatan ini secara khusus BPK menyampaikan apresiasi terhadap Pimpinan dan segenap anggota DPR periode 2004-2009 yang telah menerima saran BPK agar membentuk PAP dengan disahkannya UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pada tanggal 29 Agustus 2009. Dalam pasal 110 UU tersebut, PAP disebut sebagai

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Dengan terbentuknya BAKN, DPR sebagai representasi dari seluruh rakyat Indonesia yang memiliki hak budget dan pengawasan diharapkan lebih mengetahui secara transparan penggunaan uang rakyat secara menyeluruh.

Disamping keenam bentuk inisiatif yang telah diuraikan sebelumnya, BPK juga memiliki inisiatif khusus untuk membangun kelembagaan keuangan daerah di lingkungan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang kemudian dapat dicontoh untuk diterapkan di daerah lain. Inisiatif tersebut meliputi bidang perencanaan pembangunan, manajemen keuangan daerah, serta teknologi informasi dan komunikasi. Dewasa ini, BPK, bersama dengan Depkeu dan Depdagri sedang mendesain dua jenis program khusus dibidang keuangan daerah. Kedua jenis program itu adalah dalam bidang perencanaan pembangunan dan manajemen keuangan daerah dan diharapkan dimulai pada bulan September 2009. Kedua program ini dimaksudkan untuk membangun kapasitas Pemda kedua provinsi itu dalam melaksanakan otonomi daerah. Kedua program pelatihan itu akan dilakukan di dua universitas yang ada di kedua provinsi tersebut dengan bantuan desain silabus serta tenaga pengajar dari LPEM Fakultas Ekonomi UI maupun enam perguruan tinggi yang telah digunakan oleh Depkeu untuk melakukan pelatihan manajemen keuangan daerah¹.

Dibidang teknologi informasi dan komunikasi, kedua provinsi tersebut membutuhkan perangkat dan sistem teknologi untuk memudahkan pertukaran informasi dan komunikasi terkait pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah. Pembangunan sistem informasi dan komunikasi antara pemerintah daerah di kedua provinsi tersebut sangat mendesak mengingat faktor kondisi geografis serta keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi. Dalam hal ini, BPK menyarankan untuk membangun sistem informasi dan komunikasi, dengan mengambil contoh seperti yang telah dibangun dan dilaksanakan oleh BRR Aceh-Nias untuk mengelola dan memantau semua aktifitas terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah Aceh dan Nias.

Pimpinan Rapat serta hadirin yang saya muliakan

Melalui berbagai kegiatan dialog publik dan enam inisiatif yang merupakan *beyond the call of duty* bagi BPK, pada Tahun 2008 sudah terlihat tanda-tanda positif perbaikan sistem keuangan negara di Indonesia. Tanda-tanda perbaikan tersebut adalah sebagai berikut: *pertama*, sudah banyak instansi pemerintah di pusat maupun daerah yang telah menyerahkan

¹ Keenam Perguruan Tinggi itu adalah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Andalas, Universitas Hasanuddin, Universitas Brawijaya dan Universitas Sam Ratulangi. UI dan UGM memulai pembukaan Latihan Keuangan Daerah (LKD) pada tahun 1981/82. Kursus Keuangan Daerah dibuka pada tahun 1985/86 di UI, UGM, Unand dan Unhas yang kemudian diperluas ke Unibraw dan Unsrat pada tahun 2007. Pada tahun 2007 itu juga dibuka Kursus Keuangan Daerah (KKD) Khusus Penataan dan Akuntansi Keuangan di keenam Perguruan Tinggi tersebut.

rencana aksi perbaikan opini sistem keuangan kepada BPK. *Kedua*, adanya kemajuan opini pemeriksaan LKKL. Jumlah Kementerian/Lembaga (K/L) yang memperoleh opini WTP meningkat dari tujuh K/L pada Tahun 2006 menjadi 35 K/L pada Tahun 2008. Sedangkan K/L yang memperoleh opini TMP atau *disclaimer* menurun, dari 35 K/L pada Tahun 2006 menjadi 16 K/L pada Tahun 2008 dari 83 K/L yang ada. Kemajuan LKKL terjadi pada berbagai departemen besar seperti Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, Departemen Pertahanan dan TNI, Departemen Pertanian, dan Departemen Pendidikan Nasional.

Tanda perbaikan *ketiga*, adalah kemajuan opini pemeriksaan LKPD. Jumlah pemda yang memperoleh opini WTP meningkat dari tiga pemda pada tahun 2006 menjadi delapan pemda pada tahun 2008. Sementara itu opini TMP menurun dari 106 pemda pada tahun 2006 menjadi 32 pemda pada Tahun 2008. *Keempat*, lembaga perwakilan/legislatif sudah memenuhi saran BPK agar membentuk Panitia Akuntabilitas Publik yang disebut sebagai Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dengan disahkannya UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dengan demikian dimasa mendatang lembaga perwakilan diharapkan lebih efektif dalam melaksanakan hak budget dan pengawasan atas perencanaan, pengelaaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban anggaran negara. Sedangkan tanda perbaikan *kelima* adalah Direktorat Jenderal Pajak sudah mulai semakin terbuka untuk diperiksa oleh BPK. Dengan demikian BPK dapat melakukan pemeriksaan dua sisi anggaran negara dan tidak lagi hanya pada sisi pengeluaran APBN tetapi juga sisi penerimaan.

Pimpinan Rapat serta hadirin yang saya muliakan

Selain adanya tanda-tanda positif pada perbaikan sistem keuangan negara, BPK juga menilai telah ada perkembangan positif atas masalah-masalah penting pada LKPP. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2004 pemeriksaan laporan keuangan BPK menemukan rekening liar sebanyak 957 rekening senilai Rp20 triliun. Kondisi tersebut juga terjadi pada Tahun 2005, 2006, dan 2007 secara berturut-turut sebanyak 1.303 rekening, 2.383 rekening, dan 2.240 rekening dengan nilai masing-masing Rp8,5 triliun, Rp3,25 triliun, dan Rp1,39 triliun. Atas permasalahan tersebut, BPK telah mendorong Pemerintah untuk menertibkan pengelolaan rekening milik pemerintah. Selanjutnya, Pemerintah telah merespon dan menindaklanjuti dengan membentuk Tim Penertiban Rekening Pemerintah (TPRP). Berdasarkan laporan akhir atas penertiban rekening pada akhir Tahun 2008, pemerintah telah menertibkan sebanyak 39.477 rekening liar senilai Rp35,4 triliun, USD238 juta dan €2,9 juta.

Untuk mengatasi kelemahan pencatatan aset dan inventarisasi kekayaan negara, sejak dua tahun lalu pemerintah telah membentuk Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Pada Tahun

2008, Pemerintah telah menyelesaikan inventarisasi dan penilaian kembali aset tetap pada 10.254 dari 22.307 satuan kerja (satker). Hasil penilaian kembali aset pada 2.054 satker senilai Rp48 triliun telah dibukukan dan hasil revaluasi aset pada 8.200 satker senilai Rp77 triliun belum dibukukan. Inventarisasi dan penilaian kekayaan negara bukan saja penting untuk menambah akuntabilitas dari segi kewajaran penilaian yang disajikan dalam neraca, namun juga penting untuk mengetahui kesiapan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga negara.

Hal serupa terjadi pada Pencatatan investasi pada 114 dari 142 BUMN (62% dari total investasi Penyertaan Modal Negara) sudah didasarkan pada laporan keuangan BUMN yang telah diperiksa. Pemerintah juga telah melakukan upaya perbaikan terhadap pencatatan utang jangka panjang luar negeri. Selama kurun waktu Tahun 2004–2007, nilai *outstanding* utang luar negeri tidak dapat diyakini. Namun, pada Tahun 2008 saldo utang luar negeri yang dilaporkan di neraca LKPP 2008 sudah dapat terkonfirmasi dengan pemberi pinjaman luar negeri.

Pimpinan Rapat serta hadirin yang saya muliakan

Sesuai dengan mandat UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 20 bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester. Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, mengungkapkan bahwa sampai dengan akhir Semester I TA 2009, secara keseluruhan terdapat lebih dari 62 ribu temuan senilai hampir Rp3 ribu triliun dengan jumlah rekomendasi lebih dari 112 ribu senilai Rp2 ribu triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 49 ribu rekomendasi diantaranya senilai Rp582 triliun telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak hampir 22 ribu rekomendasi senilai Rp1.285 triliun telah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai dengan rekomendasi atau masih dalam proses ditindaklanjuti dan sisanya sekitar 41 ribu rekomendasi senilai Rp313 triliun belum ditindaklanjuti. Sementara itu, kerugian negara yang dipantau pada Semester I Tahun 2009 senilai Rp4,5 triliun, USD46,9 juta dan sejumlah valuta asing lainnya dengan tingkat penyelesaian sebesar hampir 40% senilai Rp1,14 triliun dan USD40,7 juta.

Sampai dengan akhir semester I tahun 2009, Hasil Pemeriksaan (HP) BPK yang berindikasi unsur pidana yang disampaikan kepada instansi berwenang sebanyak 223 kasus senilai Rp30,5 triliun dan USD470 juta. Dari 223 kasus tersebut, Instansi Penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian dan KPK) telah menindaklanjuti 132 kasus (59%) ke dalam proses peradilan yaitu penyelidikan 20 kasus (9%), penyidikan 15 kasus (7%), penuntutan 8 kasus

(4%), putusan 37 kasus (17%), dihentikan 10 kasus (4%), dan dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi atau KPK sebanyak 42 kasus (18%).

Khusus selama semester I Tahun 2009 saja, hasil pemeriksaan BPK berindikasi unsur pidana yang diserahkan kepada instansi penegak hukum sebanyak 19 kasus senilai Rp340 miliar dan USD94,6 ribu. Rinciannya adalah sebanyak 8 kasus senilai Rp92 miliar diserahkan ke Kejaksaan Agung serta sebanyak 11 kasus senilai Rp248 miliar dan USD94,6 ribu diserahkan kepada KPK.

Pimpinan Rapat serta hadirin yang saya hormati

Dewasa ini, BPK merupakan institusi yang paling transparan dan akuntabel di Indonesia. Laporan keuangannya diperiksa oleh KAP yang ditunjuk oleh Komisi XI DPR dari tiga calon yang diusulkan Departemen Keuangan dan tiga calon yang diusulkan BPK sedangkan mutu pekerjaan dan kinerjanya direviu lembaga pemeriksa tertinggi negara lain. *Lead by example* BPK tercermin dari opini pemeriksaan KAP Hadori Yunus dan Rekan (untuk tahun 2006 dan 2007) serta Wisnu B. Suwito dan Rekan (pada tahun 2008) pada laporan keuangan BPK yang sudah menjadi WTP untuk kedua kalinya, pada tahun buku 2007 dan 2008. Hasil reviu lembaga pemeriksa tertinggi Negeri Belanda (*Algemene Rekenkamer*) atas kinerja BPK sangat menggembirakan yaitu memberikan nilai sangat positif kepada BPK. Karena adanya peningkatan mutu kerja BPK, mitra kerja dari negara-negara lain semakin bersedia membantu BPK dalam hal penyusunan *Strategic Plan*, peningkatan mutu SDM maupun dalam kegiatan pembangunan kapasitas dibidang teknologi, kerjasama pemeriksaan maupun pertukaran pengalaman. Lembaga pemeriksa negara-negara lain pun kini ingin belajar pada BPK tentang *quality assurance* maupun melakukan audit investigasi.

Kami berharap seluruh pencapaian BPK dibidang transparansi dan akuntabilitas keuangan negara diikuti lembaga-lembaga negara lainnya. Meskipun masih terdapat banyak kelemahan, hasil perbaikan sistem keuangan negara oleh pemerintah saat ini sudah mengalami kemajuan. BPK menghargai usaha yang dilakukan pemerintah sebagai pengelola keuangan negara/daerah dan lembaga perwakilan sebagai pemegang hak budget melalui pembenahan peraturan perundang-undangan, pengawasan, maupun tindakan hukum yang harus diambil untuk mengamankan dan menertibkan pengelolaan keuangan negara/daerah.

Pimpinan Rapat serta hadirin yang saya hormati

Dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya atas nama Pimpinan BPK menyampaikan terima kasih kepada Ketua, Para Wakil Ketua, Pimpinan Alat Perlengkapan Dewan, Pimpinan Komisi-Komisi, serta Para Anggota DPR yang terhormat atas kerja sama yang telah terjalin baik selama ini khususnya dalam mendorong terwujudnya *clean government* dan *good governance* serta pelaksanaan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel sesuai tuntutan *stakeholders* BPK. Demokrasi tidak hanya sebatas pada transparansi pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan eksekutif, namun juga termasuk transparansi untuk apa uang rakyat digunakan. Saat ini setidaknya upaya mengawal berbagai bentuk demokrasi tersebut telah mendapatkan titik cerah. DPR periode 2004-2009 telah memberikan fondasi kuat kepada DPR periode mendatang untuk lebih "bertaj" dibidang keuangan negara yakni dengan dibentuknya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Kami, pimpinan BPK tahun 2004-2009, pun berharap agar hubungan kerja sama yang telah terjalin baik antara BPK dengan DPR selama ini dapat terus dilanjutkan bahkan ditingkatkan oleh siapapun yang menjadi pimpinan BPK dan DPR nantinya.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan pada rapat paripurna yang terhormat ini. Kami berharap agar Pimpinan dan Anggota Dewan dapat memanfaatkan informasi yang kami sampaikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester dan Laporan Hasil Pemeriksaan untuk mendukung tugas dan wewenang DPR sesuai peraturan perundang-undangan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.

Wabilhittaufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Ketua,**

Prof. Dr. Anwar Nasution